

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu usaha atau proses dalam melakukan perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih layak, baik secara fisik maupun nonfisik. Pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan mendasar dalam perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan (Todaro, 2011). Pembangunan tentu saja dilakukan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada sekaligus merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan tuntutan-tuntutan pergeseran waktu akibat berkembangnya peradaban, sistem sosial kemasyarakatan, dan teknologi yang lebih maju.

Berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu daerah bisa dilihat dari IPM. Suatu negara dapat meningkatkan IPM dengan melakukan pembangunan ekonomi (Syofyan, 2018). Adapun keunggulan dari pembangunan manusia yang mempunyai sifat multidimensional yang melekat pada prosesnya, artinya pembangunan manusia tidak lagi murni secara ekonomi tetapi juga menyangkut aspek sosial penduduk. Dengan demikian harapannya pembangunan yang berlangsung dapat disertai dengan pemerataan pendapatan dan setiap penduduk

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mendorong terwujudnya kesejahteraan yang bersifat universal (Todaro dan Smith, 2014).

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Masyarakat diharapkan bukan hanya menjadi obyek pembangunan tetapi dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah secara makro sehingga dapat memajukan suatu negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli).

Menurut Badan Pusat Statistik (2022), IPM merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM juga dikenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Beberapa indikator dalam penghitungan IPM sudah tidak tepat digunakan seperti angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDRB per kapita juga tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kedua penggunaan rumus rata-rata dalam perhitungan IPM menggambarkan capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutup oleh capaian tinggi dari dimensi lainnya.

Adapun IPM dibentuk berdasarkan 3 dimensi dasar berupa: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan/pendidikan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, yang ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Penggunaan indikator baru ini dianggap lebih tepat dan dapat membedakan secara baik (*diskriminatif*) dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Pada Produk Nasional Bruto (PNB) yang menggantikan Produk Domestik Bruto (PDB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya (BPS, 2023). IPM sangat penting untuk diukur kerana pembangunan manusia ini bisa dilihat pada kualitas sumber daya manusia di suatu negara, dan penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu negara. Aceh merupakan salah satu provinsi dengan tingkat IPM tertinggi di Indonesia. Hal ini dapat di buktikan pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan IPM di Indonesia Tahun 2021-2022**

No	Provinsi	Tahun	
		2021	2022
1	Aceh	72.18	72.80
2	Sumatera Utara	72.00	72.71
3	Sumatera Barat	72.65	73.26
4	Riau	72.94	73.52
5	Jambi	71.63	72.14
6	Sumatera Selatan	70.24	70.90
7	Bengkulu	71.64	72.16
8	Lampung	69.90	70.45
9	Kep. Bangka Belitung	71.69	72.24
10	Kep. Riau	75.79	76.46
11	Dki Jakarta	81.11	81.65
12	Jawa Barat	72.45	73.12
13	Jawa Tengah	72.16	72.79
14	DI. Yogyakarta	80.22	80.64
15	Jawa Timur	72.14	72.75
16	Banten	72.72	73.32
17	Bali	75.69	76.44
18	Nusa Tenggara Barat	68.65	69.46
19	Nusa Tenggara Timur	65.28	65.90
20	Kalimantan Barat	67.90	68.63
21	Kalimantan Tengah	71.25	71.63
22	Kalimantan Selatan	71.28	71.84
23	Kalimantan Timur	76.88	77.44
24	Kalimantan Utara	71.19	71.83
25	Sulawesi Utara	73.30	73.81
26	Sulawesi Tengah	69.79	70.28
27	Sulawesi Selatan	72.24	72.82
28	Sulawesi Tenggara	71.66	72.23
29	Gorontalo	69.00	69.81
30	Sulawesi Barat	66.36	66.92

No	Provinsi	Tahun	
		2021	2022
31	Maluku	69.71	70.22
32	Maluku Utara	68.76	69.47
33	Papua Barat	65.26	65.89
34	Papua	60.62	61.39

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 Badan Pusat Statistik (2023) dapat dilihat bahwa IPM Provinsi Aceh terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya IPM Aceh. Pada tahun 2022, IPM Aceh telah mencapai 72,80%. Angka ini meningkat sebesar 0,62 point atau 0,86% dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 72,18% (BPS,2022). Peningkatan IPM Provinsi Aceh 2022 ini terjadi pada semua komponen, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Provinsi Aceh memiliki 22 Kabupaten/Kota yang ikut mengalami peningkatan pada IPM. Salah satu kabupaten yang ikut mengalami peningkatan pada IPM di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Tamiang.

Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Aceh, Indonesia. Jumlah penduduknya 301.492 jiwa, luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang 295,55 km<sup>2</sup>. Menurut data yang disediakan Badan Pusat Statistik (BPS) pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Tamiang cenderung naik setiap tahunnya, tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang disusun Pemerintah Daerah. Gambaran perkembangan IPM di Provinsi Aceh sebagai berikut:

**Tabel 1. 2**  
**Perkembangan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2021-2022**

No	Kabupaten/Kota	Tahun	
		2021	2022
1	Kabupaten Simeulue	66.41	67.27
2	Kabupaten Aceh Singkil	69.22	69.62
3	Kabupaten Aceh Selatan	67.44	67.87
4	Kabupaten Aceh Tenggara	69.44	70.32
5	Kabupaten Aceh Timur	67.83	68.72
6	Kabupaten Aceh Tengah	73.37	73.95
7	Kabupaten Aceh Barat	71.67	72.34
8	Kabupaten Aceh Besar	73.58	74.00
9	Kabupaten Pidie	70.70	71.20
10	Kabupaten Bireuen	72.33	73.16
11	Kabupaten Aceh Utara	69.46	70.22
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	66.99	67.41
13	Kabupaten Gayo Lues	67.56	68.25
14	Kabupaten Aceh Tamiang	69.48	70.43
15	Kabupaten Nagan Raya	69.31	70.10
16	Kabupaten Aceh Jaya	69.84	70.36
17	Kabupaten Bener Meriah	73.27	73.90
18	Kabupaten Pidie Jaya	73.60	74.34
19	Kota Banda Aceh	85.71	86.28
20	Kota Sabang	76.11	76.85
21	Kota Langsa	77.44	77.82
22	Kota Lhokseumawe	77.57	78.04

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2023

Pada tabel 1.2 menunjukkan angka IPM di Kabupaten Aceh Tamiang, yang kisaran pada 70,43% hingga saat ini, tidak terlepas dari bagaimana kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah daerah. Peningkatan IPM karena tercapainya beberapa komponen, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran per kapita yang sudah disesuaikan untuk menunjang peningkatan IPM tersebut. Angka IPM di Kabupaten Aceh Tamiang saat ini mencapai 70,43%, sedangkan urutan tertinggi lainnya secara berurut, yaitu Banda Aceh 86,28%, Lhokseumawe 78,04%, Langsa 77,83%, Sabang 76,85%, Pidie Jaya 74,34%,

Aceh Besar 74,00%, Aceh Tengah 73,95%, Bener Meriah 73,90%, Bireuen 73,16 % dan Aceh Barat 72,34%, Kabupaten Pidie 71,02% dan paling rendah Subulussalam 65,27%.

IPM dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti PDRB dan Kemiskinan. Untuk melihat pemerataan pembangunan adalah dengan melihat tingkat PDRB. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari meningkatnya IPM di suatu daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing daerah mengidentifikasi bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu indikator IPM di suatu wilayah adalah PDRB yang merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian suatu daerah (Maulana dan Ichsan, 2022).

Semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Dalam kenyataannya, PDRB memiliki pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah *output* dalam seluruh unit ekonomi suatu wilayah akan meningkat.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB

yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

PDRB berkaitan erat dengan IPM. IPM merupakan alat ukur kesejahteraan yang disempurnakan, sementara PDRB adalah pengukuran kesejahteraan yang lama. Namun demikian, dua pengukuran tersebut tidak harus selalu berjalan linier (bersama-sama), karena peningkatan PDRB tanpa disertai peningkatan pemerataan pendapatan dan alokasi atas aktivitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tidak akan meningkatkan IPM begitu juga sebaliknya.

Selain PDRB, faktor lain yang mempengaruhi IPM adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya untuk hidup atau suatu keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap pangan, kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan dalam kondisi sosial. Kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasarkan kebutuhan beras beserta kebutuhan gizi yang baik.

Menurut Utami (2020) kemiskinan menjadi masalah dalam kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya

alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak-hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Berikut merupakan perkembangan PDRB dan Kemiskinan serta IPM di Kabupaten Aceh Tamiang.

**Tabel 1. 3**  
**PDRB, Kemiskinan dan IPM di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008-2022**

<b>Tahun</b>	<b>IPM (%)</b>	<b>PDRB ADHK (Juta Rupiah)</b>	<b>KEMISKINAN (Ribu Jiwa)</b>
2008	69.81	4105029,41	50800
2009	70.50	4338844,75	45300
2010	64.67	4406760,48	45200
2011	64.89	4474076,21	45295
2012	65.21	4651203,15	44316
2013	65.56	4885618,65	40817
2014	66.09	5002816,77	39909
2015	67.03	5134529,77	40380
2016	67.41	5279640,30	40880
2017	67.99	5491009,34	42010
2018	68.45	5724227,89	41209
2019	69.23	5984418,53	39350
2020	69.24	6009374,16	38930
2021	69.48	6062520,23	40030
2022	70.43	6264034,61	38250

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan Tabel 1.3 dari Badan Pusat Statistik (2023), menunjukkan bahwa PDRB di Kabupaten Aceh Tamiang setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar 4105029,41 dan meningkat kembali sebesar 6264034,61 pada tahun 2022 yang diikuti dengan meningkatnya IPM. Hal tersebut dapat dilihat hubungan yang cenderung searah atau positif antara PDRB dengan IPM di Kabupaten Aceh Tamiang.

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang berfluktuasi setiap tahunnya, ditahun 2008 Kemiskinan di Kabupaten

Aceh Tamiang sebesar 50.800 ribu jiwa, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 39.909 ribu jiwa lalu mengalami peningkatan kembali pada tahun 2017 yaitu sebesar 42.010 ribu jiwa, serta terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 41.209 ribu jiwa, namun pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 40.030 ribu jiwa dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sebesar 38.250 ribu jiwa. Hal tersebut berpengaruh terhadap IPM, walaupun IPM meningkat pada tahun tersebut namun peningkatan IPM sangat rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas, memberi motivasi penulis untuk meneliti mengenai keadaan PDRB, Kemiskinan dan IPM di Kabupaten Aceh Tamiang dengan tahun yang diamati 2008-2022. Penulis memilih metode ini untuk melihat bagaimana pengaruh yang terjadi antara perubahan variabel IPM yang mampu di deskripsikan oleh variabel PDRB dan Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang.

PDRB dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang oleh Nuriyah, Muafiqie dan Junaedi, 2017 dari penelitian ini yang menitik beratkan perhatian pada IPM yang banyak dipublikasikan baik di jurnal internasional maupun jurnal nasional bahkan jurnal lokal. Pengaruh PDRB, Kemiskinan, dan Jumlah Penduduk Terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 yang diteliti oleh Rinawati et al, 2022. Pengaruh Kemiskinan, TPT, PDRB dan PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2010-2020 oleh Halik, 2022. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali oleh Sudana et al,

2021. *Impact Of Human Poverty On The Human Development Index In Jordan Within The Periode 2003-2016* oleh Al-Nasser dan Al-Hallaq, 2019.

Penelitian ini menjadi berbeda tentunya dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan, panjang data yang digunakan dan lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh PDRB terhadap IPM di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Seberapa besar pengaruh Kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Seberapa besar pengaruh PDRB dan Kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Aceh Tamiang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh PDRB terhadap IPM di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB dan Kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kajian ini dilakukan dengan harapan akan membawa manfaat teoritis dan praktis, antara lain:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah tentang pengaruh PDRB dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan dijadikan sebagai referensi penelitian yang akan datang dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan untuk pertimbangan bagi pemerintah Aceh Tamiang di dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia.
2. Memperluas pengetahuan peneliti serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah terkait dengan indeks pembangunan manusia.